



LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN SEMESTER I TAHUN 2023

A. Pendahuluan

Manajemen Risiko merupakan salah satu tahapan dalam Pengendalian Intern. Penerapan Manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam konsep Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP berada pada level first line defense sedangkan Manajemen Risiko berada pada level second line defense yang mengelola Risiko lintas intern kementerian, serta Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern kementerian bertindak sebagai third line defense.

Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola/mengendalikan Risiko dan potensinya. Salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko adalah Penanganan Risiko berdasarkan hasil Identifikasi & Analisis Risiko serta Evaluasi Risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Untuk memastikan penanganan risiko berjalan sesuai dengan Rencana Aksi Penanganan Risiko maka dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Pengendalian Risiko ini merupakan bahan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko sebagai tindak lanjut dalam proses pengendalian risiko yang dapat menghambat maupun menggagalkan tujuan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian risiko yaitu setiap risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang mengacu kepada indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pelaksanaan pengendalian risiko melibatkan Unit Pemilik Risiko dan seluruh pejabat struktural maupun pegawai non struktural yang memahami dan bertanggung jawab atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Banten Tahun 2023.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Pengendalian Risiko

Proses Pemantauan dan Reviu terhadap penanganan risiko yang dapat menghambat ataupun menggagalkan capaian tujuan organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten telah dilaksanakan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan target kinerja setiap triwulan. Pemantauan dan reviu tersebut mengacu kepada pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam rencana penanganan resiko yang telah disusun sebelumnya. Berikut progress pelaksanaan pengendalian risiko Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten :

KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Periode Penerapan : Semester I 2023 (Januari – Juni)

| No | Sisa Risiko | Indikasi | Kegiatan Pengendalian | Indikator Pengendalian | | Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian | | | |
|----|--|--|--|--|--------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | Output | Target | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Potensi Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan - belum terdapat pedoman teknis tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan | Internalisasi penguatan dan pembinaan pegawai tentang pencegahan dan penanganan tindak korupsi | Jumlah kegiatan Internalisasi penguatan dan pembinaan pegawai tentang pencegahan dan penanganan tindak korupsi | 4 | <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kantor Wilayah Banten melakukan penandatanganan Komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2023 - Penguatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Banten sekaligus penandatanganan komitmen bersama pada 25 Januari 2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan oleh Tim Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham tentang Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI-KPK) pada tanggal 12 Juni 2023 | - | - |
| | | | Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengawasan tindak korupsi | Jumlah kegiatan Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengawasan tindak korupsi | 4 | - | - | - | - |
| | | | Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan pencegahan dan penanganan tindak korupsi | Dokumen pedoman pelaksanaan pengawasan dalam pencegahan dan penanganan tindak korupsi | 1 | - | - | - | - |
| | | | Pengembangan Aplikasi Jawara dalam pelaksanaan | Penerapan Aplikasi Jawara dalam pelaksanaan | 1 | Penggunaan aplikasi Jawara dalam pelaksanaan layanan publik pada Kantor Wilayah Banten periode | Penggunaan aplikasi Jawara dalam pelaksanaan layanan publik pada Kantor Wilayah | - | - |

| No | Sisa Risiko | Indikasi | Kegiatan Pengendalian | Indikator Pengendalian | | Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian | | | |
|----|---|---|--|--|--------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | Output | Target | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | layanan publik | layanan publik | | Jan-maret 2023 sebanyak 33 pengguna layanan | Banten periode Jan-Juni 2023 sebanyak 77 pengguna layanan | | |
| 2 | Pegawai tidak tepat waktu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi | Kurangnya pembinaan oleh atasan langsung | Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi | Jumlah kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi | 6 | - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan kegiatan CORPU selama Triwulan I 2023 sebanyak 9 Kegiatan | - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan kegiatan CORPU selama Triwulan II 2023 sebanyak 6 Kegiatan - Penguatan dan Pembinaan Pegawai melalui pengarahan Inspektur Jenderal pada Kegiatan Gerbang Transisi atau Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Motivasi dan Inspirasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023 | | |
| | | | Penerapan hukuman disiplin pegawai | Jumlah Kegiatan Penerapan hukuman disiplin pegawai | 1 | - | - Penerapan Hukuman Disiplin kepada 12 Pegawai (7 Hukdis Ringan, 4 Hukdis Sedang, 1 Hukdis Berat) | | |
| | | | Pengembangan aplikasi M-Hukdis | Penerapan aplikasi M-Hukdis | 1 | | - Pemanfaatan M-Hukdis dalam pembinaan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Banten kepada 8 Pegawai (6 Hukdis Berat, dan 1 Hukdis Sedang, 1 Hukdis Ringan) | | |
| 3 | Rendahnya Tingkat penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris | Sulit terpenuhinya unsur majelis dalam pelaksanaan sidang MPW | Inventarisir Laporan Pengaduan terhadap Notaris | Dokumen Klasifikasi Jenis Pengaduan terhadap Notaris | 1 | | Tersusunnya Dokumen Inventarisasi Pengaduan Notaris di tingkat MPD & MPW dengan jumlah pengaduan hingga Juni 2023 sebanyak 12 laporan pengaduan masyarakat, dengan rincian: A. Jumlah Laporan Pengaduan - MPW : 7 Laporan | - | - |

| No | Sisa Risiko | Indikasi | Kegiatan Pengendalian | Indikator Pengendalian | | Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian | | | |
|----|--|--|--|--|--------|---|--|--------------|-------------|
| | | | | Output | Target | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | (pengaduan 2022 yang belum terselesaikan) - MPD : 5 Laporan (pengaduan 2023) B. Jumlah Penyelesaian - MPW : 5 Laporan - MPD : 2 Laporan | | |
| | | | Pelaksanaan sidang Majelis Pemeriksa terhadap penyelesaian pengaduan Notaris | Jumlah putusan/rekomendasi penyelesaian pengaduan notaris | 6 | - | Hingga Juni 2023 Jumlah Putusan/rekomendasi penyelesaian Pengaduan notaris di Tingkat MPW sebanyak 5 putusan/rekomendasi dari total 7 laporan pengaduan | - | - |
| | | | Evaluasi atas pelaksanaan penyelesaian pengaduan notaris di Wilayah | Jumlah kegiatan evaluasi atas pelaksanaan penyelesaian pengaduan notaris di wilayah | 2 | - | - | | |
| 4 | Minimnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan KI | Tidak meratanya informasi yang disampaikan kepada masyarakat di wilayah tentang mekanisme pendaftaran KI secara mandiri (online) | Pelaksanaan Edukasi dan sosialisasi mekanisme pendaftaran KI secara mandiri (online) | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Edukasi dan sosialisasi mekanisme pendaftaran KI secara mandiri (online) | 6 | - Pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi merek di kota cilegon pada 14 februari 2023 - Pelaksanaan kegiatan lokakarya Kekayaan Intelektual di Kota Tangerang pada 7 maret 2023 - Pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan dan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kota Tangerang Selatan pada 17 maret 2023 | - Konsultasi Teknis terkait Pemanfaatan Informasi Paten di Hotel Trembesi BSD, 16 Mei 2023 - Sosialisasi Paten dan Desain Industri di Hotel Trembesi BSD, 15 Mei 2023 - Terselenggaranya Sosialisasi Merek Kolektif dan Indikasi Geografis di Horison Rahaya Resort Lebak, 4 Mei 2023 - Terselenggaranya Promosi dan Diseminasi Merek di Hotel Forbis Serang, 10 April 2023 | - | - |

| No | Sisa Risiko | Indikasi | Kegiatan Pengendalian | Indikator Pengendalian | | Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian | | | |
|----|--|--|---|---|--------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | Output | Target | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Sosialisasi aplikasi Pepito kepada masyarakat & stakeholder | Jumlah kegiatan Sosialisasi aplikasi Pepito kepada masyarakat & stakeholder | 4 | - Konsultasi dan pendampingan teknis pendaftaran merek dalam kegiatan fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual bagi UMK pada tanggal 8 Maret 2023 | - Pelayanan Konsultasi Pendaftaran KI dalam event Cilegon Fest, 7-9 Mei 2023 - Pelayanan Konsultasi Pendaftaran KI dalam event Festival Seni Multatuli Lebak, 15-17 Juni 2023 | | |
| | | | Pemanfaatan aplikasi Pepito oleh masyarakat | Database jumlah masyarakat yang mengakses Pepito | 100 | - Tersedianya database Pepito dengan jumlah pengguna layanan tahun 2022 sebanyak 194 pengguna, dan hingga Triwulan I 2023 sebanyak 28 Pengguna layanan (Jan-Mar) | - Tersedianya database Pepito dengan jumlah pengguna layanan hingga Juni 2023 sebanyak 85 Pengguna layanan | | |
| 5 | Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum | Bantuan hukum yang diberikan oleh OBH dirasa kurang memenuhi kebutuhan /harapan penerima bantuan hukum | Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum | Jumlah kegiatan pengawasan bantuan hukum di Wilayah | 6 | - | - Pengawasan bantuan hukum kepada 11 penerima bantuan hukum yang didampingi oleh 3 pemberi bantuan hukum, bertempat di Rutan Kls I Tangerang pada tanggal 10 April 2023 - Pengawasan bantuan hukum kepada 24 penerima bantuan hukum yang didampingi oleh 5 pemberi bantuan hukum, bertempat di LP Kls IIA Tangerang pada tanggal 10 April 2023 - Pengawasan bantuan hukum kepada 10 penerima bantuan hukum yang didampingi oleh 4 pemberi bantuan hukum yang dilakukan dengan berkunjung sesuai domisili penerima bantuan hukum pada tanggal 11 s.d 17 April 2023 | - | - |

| No | Sisa Risiko | Indikasi | Kegiatan Pengendalian | Indikator Pengendalian | | Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian | | | |
|----|--|---|--|--|--------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | Output | Target | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Pelaksanaan Evaluasi atas kinerja OBH | Jumlah kegiatan evaluasi atas kinerja OBH | 2 | - | - | - | - |
| | | | Kerjasama dengan Pemda untuk menyediakan Posko Bangkumis guna optimalisasi layanan bantuan hukum | Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemda untuk menyediakan Posko Bangkumis guna optimalisasi layanan bantuan hukum | 5 | Hingga Maret 2023, terdapat 2 Pengguna Layanan/ masyarakat yang mengajukan bantuan hukum pada Posko Bangkumis | - Hingga Juni 2023, terdapat 5 pengguna layanan/ masyarakat yang mengajukan bantuan hukum pada Posko Bangkumis - Pada Tahun 2023, layanan Posko Bangkumis telah bekerjasama dengan 4 Kecamatan di Wilayah Banten diantaranya: 1. Kec.Panongan (Kab. Tangerang), 2. Kec. Legok (Kab. Tangerang) 3. Kec. Setu (Kota Tangsel) 4. Kec. Karawaci (Kota Tangerang) | | |
| 6 | Rendahnya pengawasan terhadap WNA di Wilayah | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi keberadaan WNA di Wilayah | Koordinasi dengan pejabat dan aparat setempat untuk pengawasan WNA di Wilayahnya | Jumlah kegiatan Koordinasi dengan pejabat dan aparat setempat untuk pengawasan WNA di Wilayahnya | 6 | - Koordinasi dengan Kanwil DJBC Banten dalam sinergitas pengawasan lalu lintas orang asing dan penegakan hukum pada 2 maret 2023 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi TIMPORA tingkat Kab. Lebak pada 13 Maret 2023 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi TIMPORA tingkat kota Cilegon pada 16 Maret 2023 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi TIMPORA Tingkat Provinsi Banten pada 22 Februari 2023 | - Rapat Koordinasi TIMPORA tingkat Kota Cilegon pada 19 Juni 2023 - Rapat Koordinasi TIMPORA tingkat Wilayah Tangerang pada 30 Mei 2023 | - | - |
| | | | Edukasi dan Sosialisasi tentang | Jumlah kegiatan Edukasi dan | 3 | - Pelaksanaan sosialisasi APOA – Jawara bagi para pengelola | - | - | - |

| No | Sisa Risiko | Indikasi | Kegiatan Pengendalian | Indikator Pengendalian | | Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian | | | |
|----|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | Output | Target | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | pengawasan dan pelaporan keberadaan WNA di Wilayah | Sosialisasi tentang pengawasan dan pelaporan keberadaan WNA di Wilayah | | <p>hotel atau penginapan di Kab. Serang pada 28 februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi, Partisipasi terkait APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing) Jawa pada para Pengelola Hotel dan Restoran di Kota Cilegon dan sebagian Wilayah Kab. Tangerang pada 2 Maret 2023 - Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi, Partisipasi terkait APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing) Jawa pada Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan stakeholder terkait di Wilayah Banten pada 21 Februari 2023 | | | |
| | | | Pemanfaatan aplikasi APOA Jawa | Database stakeholder yang memanfaatkan aplikasi | 30 | - | Stakeholder (Hotel/Penginapan) yang telah memanfaatkan APOA Jawa sebanyak 29 Stakeholder tersebar diwilayah: | - | - |
| | | | | Data Sebaran WNA di Wilayah | 4.000 | - | Tersedianya data Sebaran WNA berdasarkan APOA Jawa sebanyak 4.371 WNA yang tersebar di Wilayah : | - | - |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Kanim Tangerang: 14 Stakeholder - Kanim Cilegon: 9 Stakeholder - Kanim Serang: 6 Stakeholder | | |
| 7 | Tidak optimalnya pencegahan | 1. Minimnya sarana dan prasarana | Melakukan identifikasi potensi gangguan Kamtib di | Dokumen hasil identifikasi potensi gangguan Kamtib di | 1 | - | - | - | - |

| No | Sisa Risiko | Indikasi | Kegiatan Pengendalian | Indikator Pengendalian | | Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian | | | |
|----|---|---|--|---|--------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | Output | Target | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | potensi gangguan Kamtib | pendukung 2. Lemahnya pengendalian dan pengawasan barang terlarang masuk ke dalam lapas/rutan | Lapas/ Rutan di Wilayah | Lapas/Rutan di Wilayah | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Supervisi hasil identifikasi potensi gangguan Kamtib Lapas/ Rutan di Wilayah | Jumlah kegiatan Supervisi hasil identifikasi potensi gangguan Kamtib Lapas/Rutan di Wilayah | 7 | - | - | | |
| | | | Pelaksanaan Evaluasi penanganan potensi gangguan Kamtib oleh Kantor Wilayah | Jumlah kegiatan evaluasi penanganan potensi gangguan Kamtib oleh Kantor Wilayah | 4 | - | - | | |
| 8 | Terjadinya peredaran dan pengendalian narkoba serta penipuan online di dalam Lapas/ Rutan | 1. Minimnya sarana dan prasarana pendukung 2. Lemahnya pengendalian dan pengawasan barang terlarang masuk ke dalam lapas/rutan | pelaksanaan Inspeksi mendadak gabungan pencegahan Halinar (HP, Pungli, narkoba) | Jumlah Pelaksanaan sidak Gabungan | 12 | - Pelaksanaan kegiatan Sidak Gabungan oleh Tim Satops Patnal Kanwil Banten dan BNNP Banten di LP Kls IIA Cilegon pada 12 Januari 2023 | - Pelaksanaan Sidak Gabungan melalui kegiatan Cipta Kondisi Bersih Halinar di LP Kls I Tangerang pada tanggal 19 Mei 2023 - Pelaksanaan Sidak Gabungan melalui kegiatan Cipta Kondisi Bersih Halinar di LP Kls I Tangerang pada tanggal 20 Mei 2023 | | |
| | | | Bimbingan Teknis tentang Kamtib | Pelaksanaan Bimtek tentang Kamtib | 6 | - Pelaksanaan Konsultasi Teknis di Bidang Keamanan dalam meningkatkan kualitas dan menjaga standar pelaksanaan tugas Pemasarakatan khususnya dibidang Keamanan dan Ketertiban, pada tanggal 1 Maret 2023 | - Sosialisasi Mitigasi Bencana pada UPT Pemasarakatan melalui CORPU pada tanggal 23 Mei 2023 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL dalam rangka sinergitas Aparat Penegak Hukum, pada tanggal 16 Mei 2023 | | |
| | | | Adanya rotasi regu penjagaan di Wilayah | Pelaksanaan rotasi regu penjagaan | 1 | - | - | | |

F. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Risiko

Pelaksanaan pengendalian risiko terhadap 8 risiko yang telah teridentifikasi di lingkungan Kantor Wilayah Banten selama periode Semester I 2023 diantaranya :

1. Pengendalian risiko atas Potensi Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Telah terlaksananya 3 kegiatan Internalisasi penguatan dan pembinaan pegawai tentang pencegahan dan penanganan tindak korupsi, dan Penerapan Aplikasi Jawara dalam pelaksanaan layanan publik kepada 77 pengguna layanan.
2. Pengendalian risiko atas Pegawai tidak tepat waktu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Telah terlaksananya 3 kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Penerapan Hukuman Disiplin kepada 12 Pegawai (7 Hukdis Ringan, 4 Hukdis Sedang, 1 Hukdis Berat), dan Pemanfaatan M-Hukdis dalam pembinaan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Banten kepada 8 Pegawai (6 Hukdis Berat, dan 1 Hukdis Sedang, 1 Hukdis Ringan).
3. Pengendalian Risiko atas Rendahnya Tingkat penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris
Tersusunnya Dokumen Inventarisasi Pengaduan Notaris di tingkat MPD & MPW dengan jumlah pengaduan hingga Juni 2023 sebanyak 12 laporan pengaduan masyarakat, dan Jumlah Putusan/rekomendasi penyelesaian Pengaduan notaris di Tingkat MPW sebanyak 5 putusan/ rekomendasi.
4. Pengendalian risiko atas Minimnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan KI
Terselenggaranya 7 kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Edukasi dan sosialisasi mekanisme pendaftaran KI secara mandiri (online), 3 kegiatan Sosialisasi aplikasi Pepito kepada masyarakat & stakeholder, dan tersedianya database Pepito dengan pengguna layanan hingga Juni 2023 sebanyak 85 Pengguna layanan.
5. Pengendalian risiko atas Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum
Terlaksananya 3 Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum, dan Pelaksanaan kerjasama dengan 4 Kecamatan di Wilayah Banten untuk menyediakan Posko Bangkumis guna optimalisasi layanan bantuan hukum.
6. Pengendalian risiko atas Rendahnya pengawasan terhadap WNA di Wilayah
Telah terlaksananya 6 kegiatan Koordinasi dengan pejabat dan aparat setempat untuk pengawasan WNA di Wilayah, pelaksanaan 3 kegiatan Edukasi dan

Sosialisasi tentang pengawasan dan pelaporan keberadaan WNA di Wilayah, tersedianya database stakeholder yang memanfaatkan aplikasi dan Sebaran WNA di Wilayah dengan jumlah 29 Stakeholde dan 4.371 WNA yang tersebar di Wilayah Banten.

7. Pengendalian risiko atas Tidak optimalnya pencegahan potensi gangguan Kamtib Pelaksanaan kegiatan pengendalian dijadwalkan bertahap mulai tanggal 3 Juli hingga bulan September 2023.
8. Pengendalian risiko atas Terjadinya peredaran dan pengendalian narkoba serta penipuan online di dalam Lapas/Rutan
Terlaksananya 3 kegiatan Inspeksi mendadak gabungan pencegahan Halinar (HP, Pungli, narkoba), dan pelaksanaan 3 kegiatan Bimbingan Teknis di Bidang Keamanan dan Ketertiban

G. Kesimpulan

Berdasarkan tabel kegiatan pengendalian risiko, pada periode Semester I 2023 telah terlaksananya pengendalian risiko terhadap 8 risiko yang telah teridentifikasi dengan jumlah 39 kegiatan, 5 Database pemanfaatan aplikasi, dan 5 dokumen pengendalian risiko. Pemantauan kegiatan pengendalian risiko dilakukan secara berkala tiap Triwulan selama periode tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko dan pejabat strutural maupun pegawai non struktural yang bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hasil pelaksanaan pengendalian risiko tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko sehingga target indikator kinerja dapat tercapai secara optimal.

Demikian Laporan Pengendalian Risiko Kantor Wilayah Banten periode Semester I tahun 2023 ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Serang, 23 Juni 2023
Kepala Kantor Wilayah

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001